

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

CICIELIA PUSPA ANGGRAENI

NIM : 2013411055

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

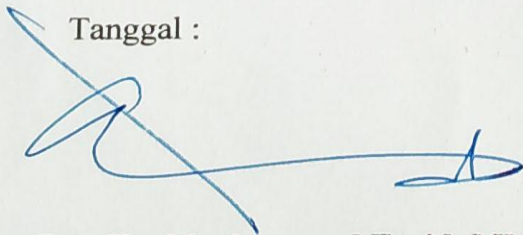
**PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR**

Nama : Cicielia Puspa Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 November 1994
NIM : 2013411055
Program Pendidikan : DIlpoma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma

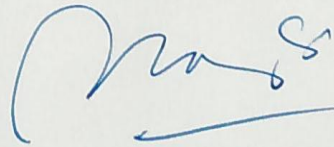
Tanggal :



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

Dosen Pembimbing

Tanggal :



Triana Mayasari, SE.Ak., M.Si., CA

I. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Terdapat empat komponen sumber pendapatan asli daerah yaitu diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lahirnya Undang-undang No.28 tahun 2009 menjelaskan mengenai pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah Daerah. Penerapan Undang-undang tersebut telah mengubah system pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang awalnya pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah.

Pajak bumi dan Bangunan dikontribusikan dalam sumber pendapatan asli daerah sehingga pencapaian target yang diperoleh sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan bangunan harus dioptimalkan guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, begitu pula dengan kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya karena memiliki sumber daya yang banyak dan juga didukung oleh banyaknya bangunan dan perusahaan yang ada di kota ini , kota Surabaya juga merupakan kota yang pertama kali mengalami pengalihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”.

II. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penulis dapat menuliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pemerintah daerah Kota Surabaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kota Surabaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013

III. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dapat membantu pemerintah dalam pembangunan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan agar cepat terealisasi dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan pendapatan daerah sendiri.
2. Dapat menambah wawasan tentang perpajakan khususnya mengenai efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah

IV. METODE PENELITIAN

Sumber data yang diperoleh antara lain berupa data primer yang berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa laporan APBD dari bidang pendapatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumenter terhadap DPPK Kota Surabaya bidang PBB dan pendapatan.

V. SUBYEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di DPPK Kota Surabaya yang bertempat di Jalan Jimerto no 25-27 Surabaya. Dinas ini memiliki 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di berbagai wilayah di Surabaya. DPPK Kota Surabaya mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Perangkat Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

VI. HASIL PENELITIAN

1. Efektifitas Penerimaan PBB-P2 kota Surabaya tahun 2009-2013

Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu pencapaian realisasi sebesar Rp308.143.066.275 yang hampir mencapai target yang ditentukan yaitu Rp328.356.194.818. Besarnya tingkat efektifitas tersebut yaitu 93,84% dengan kriteria nilai interpretasi efektif. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan, realisasi yang diperoleh hanya Rp341.759.567.832 dengan target yang harus dicapai sebesar Rp421.350.428.259 sehingga tingkat efektifitasnya menjadi 81,1%. Pada tahun 2011 merupakan tingkat efektifitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya terendah selama periode 2009 sampai dengan 2010. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya pada tahun tersebut yaitu hanya sebesar 70,23% dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif. Berdasarkan wawancara dengan pegawai DPPK kota Surabaya, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 merupakan tahun pertama yang mengalami pelimpahan Pemerintah kota Surabaya mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang dulunya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka dari itu pencapaiannya belum bisa mencapai target yang ditentukan. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, tingkat efektifitasnya masih lebih baik dibandingkan ketika Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya.

Tahun 2012, realisasi yang diterima oleh DPPK kota Surabaya tidak mencapai target yaitu hanya menerima Rp572.292.265.076 sedangkan target yang ditentukan yaitu Rp790.613.785.000 dan tingkat efektifitas yang diperoleh hanya 72,39% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2013 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya mengalami peningkatan yaitu pencapaian realisasi

Rp606.061.761.816 dengan target Rp732.456.308.000. Meskipun tidak mencapai target yang ditentukan namun tingkat efektivitas yang diperoleh sudah mencapai 82,74% yang masuk kedalam kategori cukup efektif. Rata-rata Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Surabaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu dengan prosentase 79,65% yang masuk kedalam kategori kurang efektif. Kurang efektifnya Penerimaan PBB di kota Surabaya dikarenakan banyaknya data yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya sehingga penerimaannya kurang optimal. Pihak DPPK Kota Surabaya juga masih melakukan verifikasi ulang data atas pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah. Selain itu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga menjadi penghalang keefektivitasan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Banyaknya objek pajak yang digunakan untuk fasilitas umum, hal tersebut dikarenakan perubahan objek pajak yang dulunya dikenakan pajak saat ini berubah menjadi fasilitas umum yang tidak bisa dikenakan pajak.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan tahun 2009-2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi sebesar 26,43% dan masuk dalam kategori sedang. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012, kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya diperoleh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 26,43% dan pada tahun berikutnya yaitu dari tahun 2011 ke tahun 2012 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan ini naik menjadi 30,89% dan masuk kedalam kategori cukup baik. Tahun 2013 merupakan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan kota Surabaya terendah yang diberikan terhadap pajak Pendapatan Asli Daerah selama tiga periode 2011 sampai dengan 2013. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan

pada tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 21,7% yang termasuk kedalam kategori sedang. Rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan kota Surabaya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode ini sebesar 26,33% dengan kriteria sedang.

Penurunan yang terjadi pada kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena pengoptimalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut menghadapi banyak kendala, kendala tersebut diantaranya kurangnya kesadaran warga untuk membayar pajak dikarenakan merasa terbebani dengan tarif yang dikenakan.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPPK Kota Surabaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya pada saat dikelola oleh DJP menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya. Rata-rata efektifitas yang diperoleh dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu 80,6% dengan kriteria cukup efektif.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya terhadap Pajak Daerah pada tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami penurunan. Sedangkan untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 ke 2012 mengalami kenaikan namun pada tahun 2013 mengalami penurunan.

Saran yang dapat disampaikan yang diharapkan dapat dilakukan untuk penelitian di masa mendatang yaitu :

1. Seharusnya terdapat bagian lain yang dapat mengotorisasi atau mewakili agar mempermudah peneliti melakukan wawancara, tidak menunggu satu orang yang memiliki jadwal survey padat.
2. Pengarsipan data Pendapatan Asli Daerah harusnya dijadikan satu agar tidak mempersulit penulis melakukan penelitian

DAFTAR RUJUKAN

- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya website
(<http://www.dppksby.com>, diakses 18 Oktober 2015)
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta :Andi
- _____. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Munir. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Peraturan Daerah nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009*. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004*. Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat